



Senin, 5 Juni 2023

Siaran Pers

Badan Kerja Sama
Antar-Parlemen (BKSAP)
DPR RI

Sekretariat:
Ged. Nusantara III,
Lt. 2 Jl. Jend. Gatot
Subroto Jakarta
10270 Indonesia

Website:
<http://ksap.dpr.go.id/>

Twitter:
[@bksapdprri](https://twitter.com/bksapdprri)

Instagram:
[@bksapdpr](https://www.instagram.com/bksapdpr)

YouTube:
[BKSAP DPR RI](https://www.youtube.com/BKSAPDPRRI)

BKSAP adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen. BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.

Informasi lebih lanjut,
silakan menghubungi Biro
KSAP:
021-5715814
biro_ksap@dpr.go.id

Angkat Kepimpinan Politik Perempuan, BKSAP DPR RI Gelar Sidang Koordinasi Parlemen Perempuan se-ASEAN

Padang, 5 Juni 2023, Dua bulan menjelang Sidang Umum Organisasi Parlemen ASEAN/ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA), BKSAP DPR RI menyelenggarakan Sidang Koordinasi Parlemen Perempuan se-ASEAN atau yang dikenal sebagai *Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (WAIPA). Kegiatan tersebut dilakukan secara virtual dari Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin (05/06/2023).

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon dan Sekretaris Jenderal AIPA Siti Rozaimeryanty Dato Hj. Abd Rahman. Sedangkan diskusi panel dimoderatori oleh Ketua WAIPA yang juga Anggota BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri dengan tema "*Enhancing ASEAN Resilience through Women's Leadership and Gender-Responsive Parliament*".

Turut hadir pula para Wakil Ketua BKSAP yaitu Putu Supadma Rudana, Gilang Dhielafararez, Achmad Hafisz Tohir, dan Sukamta, PhD serta beberapa orang Anggota BKSAP perempuan yaitu Dyah Roro Esti W.P., Puteri Anetta Komarudin, Linda Megawati, Kris Dayanti, Arzeti Bilbina, Vanda Sarundajang, Ina Ammania, Himmatul Aliyah, Ratih Megasari Singkarru, Ema Umiyyatul Chusnah, dan Adriana Charlotte Dondokambey.

Selain itu, hadir pula Delegasi WAIPA dari negara-negara ASEAN seperti Laos, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Viet Nam.

Dalam sambutannya, Dr. Fadli Zon menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga publik dan proses perumusan kebijakan. Sebagai contoh, keterwakilan perempuan di parlemen negara-negara ASEAN yang saat ini masih timpang. Karena itu, dorongan untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen adalah sebuah keharusan. "*Itu merupakan bentuk upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif gender dimana hak-hak perempuan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya,*" ucap Dr. Fadli Zon.

Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra tersebut juga menegaskan bahwa semakin banyak wakil perempuan di parlemen dan lembaga-lembaga publik yang akan membawa perubahan kebijakan yang lebih pro terhadap kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan.

Dalam kerangka regional, Fadli percaya bahwa kebijakan responsif gender dan juga peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen merupakan hal yang dibutuhkan bagi penguatan ketahanan ASEAN. "*Kebijakan-kebijakan responsif gender dan kepemimpinan perempuan merupakan kekuatan ASEAN untuk menghadapi berbagai tantangan regional*", ungkapnya. Karena itu, para anggota parlemen perempuan di negara-negara ASEAN harus memastikan bahwa berbagai kebijakan, program, serta penganggaran dapat merefleksikan kepentingan perempuan.

Lebih lanjut, diskusi tentang kepemimpinan politik dan kesetaraan gender tersebut diperdalam oleh tiga orang panelis yang turut hadir secara virtual yaitu Jamshed M Kazi, *Representative UN Women Indonesia & Liaison to ASEAN*, Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah, MA, Professor bidang Ilmu Politik dari Universitas Padjadjaran, serta Cecillia Makonyola, *Head of Inclusive Politics Practice* dari *Westminster Foundation for Democracy* (WFD), United Kingdom.

Sebelum itu, Irine Yusiana Roba Putri selaku Ketua WAIPA mempersilahkan Vanda D. Sarundajang, Anggota Komisi X DPR RI, untuk mempresentasikan capaian serta tantangan kepemimpinan politik perempuan di Indonesia. Mengawali presentasinya, Politisi asal Sulawesi Utara tersebut memaparkan dampak global pandemi Covid-19 terhadap perempuan. Lebih dari 47 juta perempuan di Asia Tenggara jatuh miskin selama kurun waktu 2020-2022. Sedangkan 37,7% kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di Asia Tenggara

yang menjadikannya angka tertinggi di dunia.

Pada saat yang sama, keterlibatan perempuan dalam proses pemulihan ekonomi dan pembangunan sangat terbatas. Untuk keluar dari masalah tersebut, kepemimpinan perempuan merupakan sebuah keniscayaan untuk menghadapi tantangan kawasan, di masa yang akan datang.

Tiga hal yang perlu menjadi fokus penguatan kepemimpinan perempuan dan membentuk lembaga perwakilan yang responsif gender di negara-negara ASEAN yaitu *gender-impact assessment* dalam proses legislasi, pengawasan parlemen yang sensitif gender, dan penganggaran yang responsif gender.

Beberapa isu yang mengemuka pada sesi diskusi antara lain terkait pengentasan kekerasan berbasis gender, efektivitas kebijakan afirmasi, kepemimpinan anggota parlemen perempuan dalam berbagai proses legislatif, serta peran partai politik dalam memperkuat kandidat perempuan dan partisipasi yang lebih substantif.

Peran anggota parlemen pria sebagai *'ally'* atau sekutu dalam mendorong keterwakilan politik perempuan juga turut dibahas. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana, terkait pentingnya kolaborasi antara anggota parlemen pria dan wanita untuk mendobrak berbagai hambatan sistemik bagi partisipasi politik perempuan.

Pada saat yang sama, Sukamta, PhD., selaku Wakil Ketua BKSAP DPR RI juga menyoroti pentingnya memberantas praktik diskriminatif dalam sistem elektoral dan memastikan proses pengambilan kebijakan yang inklusif. *"Ketika perempuan berperan dalam pengambilan keputusan, kebijakan yang muncul akan mencerminkan perspektif yang inklusif dalam menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat kita,"* ujarnya.

Anggota Parlemen dari Brunei Darussalam dan Laos juga turut menyampaikan capaian kepemimpinan politik perempuan di negara masing-masing. Dukungan juga diberikan oleh seluruh delegasi terhadap gagasan rencana aksi untuk memperkuat komitmen negara-negara ASEAN dalam isu ini.

Kegiatan pertemuan WAIPA ini ditutup oleh Sekjen AIPA yang sekaligus merangkul keseluruhan diskursus penguatan kepemimpinan perempuan.

Sebagai informasi, Sidang Koordinasi WAIPA atau *the Coordinating Committee Of Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* ini merupakan bagian dari Sidang menuju Sidang Komisi Parlemen Perempuan AIPA yang akan dilaksanakan pada Sidang Umum ke-44 AIPA pada bulan Agustus mendatang.
